

## PENYUSUNAN PSETK (PROFIL SOSIAL EKONOMI DAN TEKNIK KELEMBAGAAN) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN HIPPA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

**Mas Ayu Ambayoen**

Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

### PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan yang vital bagi lahan pertanian agar berproduksi dengan baik. Ketersediaannya dapat melalui air tanah maupun air permukaan (sungai) yang mengalir dan mengairi daerah lahan pertanian sekawasan tertentu yang biasa disebut Daerah Irigasi<sup>1</sup>. Pengelolaan Daerah Irigasi ini menjadi kewenangan dari petani pemakai air yang tergabung dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)<sup>2</sup>.

Pentingnya penguatan atau pemberdayaan HIPPA telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 38 tahun 2007 yang mengamanatkan HIPPA menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Amanat tersebut telah dituangkan dalam Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Tahun 2014 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/2012. Pemerintah secara teknis juga meangakomodir melalui berbagai program pemberdayaan HIPPA, diantaranya adalah program WISMP (*Water Resources Irrigation Sector Management Program*)<sup>3</sup>.

Untuk mewujudkan sistem pengembangan dan pengelolaan air irigasi yang baik dan berkelanjutan diperlukan kelembagaan HIPPA yang kuat, mandiri, dan berdaya yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Upaya pemberdayaan ini harus diawali dengan analisa potensi dan kebutuhan dari HIPPA agar semua proses kegiatan dalam program WISMP berjalan dengan efektif sesuai kebutuhan dari penerima manfaat. Analisa potensi dan kebutuhan ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyusunan Profil Sosial Ekonomi dan Teknik Kelembagaan (PSETK) secara partisipatif, sebagaimana yang pernah dibuat oleh GHIPPA Sumber Barokah, Daerah Irigasi Wringin, Kabupaten Probolinggo pada program WISMP.

Dalam review ini menjelaskan tentang: 1. Deskripsi PSETK dan bagaimana proses penyusunan yang dilakukan oleh GHIPPA<sup>4</sup> Sumber Barokah Kabupaten Probolinggo; 2.

<sup>1</sup> Definisi sesuai Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi menyebutkan bahwa Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

<sup>2</sup> HIPPA adalah istilah yang biasa dipakai di daerah Jawa Timur, Mitra Cai adalah istilah yang dipakai di daerah Jawa Barat dan banyak istilah lain di masing-masing daerah. Sedangkan istilah yang dipakai secara nasional adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

<sup>3</sup> WISMP merupakan program pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif yang melibatkan HIPPA sebagai penerima manfaat, serta merupakan program lintas sektoral yang terpadu dari tiga kedinasan, yaitu Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas PU Pengairan.

<sup>4</sup> GHIPPA adalah Gabungan HIPPA yang terdiri dari HIPPA-HIPPA dalam saluran sekunder yang sama

Bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh GHIPPA Sumber Barokah, Kabupaten Probolinggo.

## METODE

Penulisan artikel ini merupakan hasil review literatur yang berasal dari laporan hasil kegiatan pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang difasilitasi melalui program *Water Resources Irrigation Sector Management Program* (WISMP). Program ini meliputi hampir semua wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo diambil sebagai sampel secara *purposive* karena program WISMP berjalan cukup efektif di wilayah ini, khususnya penyusunan PSETK yang dilakukan oleh HIPPA sesuai Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya. Artikel ini akan mengkaji hasil penyusunan PSETK dari GHIPPA Sumber Barokah, dari Daerah Irigasi Wringin, Kabupaten Probolinggo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi PSETK dan proses penyusunannya

Profil Sosial Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan, selanjutnya disebut PSETK adalah gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) untuk perencanaan program peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif. Pelaksanaan PSETK dapat diselenggarakan melalui pendekatan Pemahaman Partisipatif Kondisi Daerah Irigasi (PPKDI), yaitu salah satu metode yang dikembangkan dari metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam pengelolaan irigasi partisipatif dan pemberdayaan organisasi HIPPA sebagai pendekatan baru dalam pelaksanaan kegiatan PSETK.

Menurut Chamber (1996) PRA diterjemahkan sebagai penilaian/ pengkajian/ penelitian keadaan pedesaan secara partisipatif. PRA bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisa keadaan mereka terhadap kehidupan dan kondisinya, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan sendiri. PRA mengutamakan masyarakat yang terabaikan agar memperoleh kesempatan untuk memiliki peran dan mendapat manfaat dalam kegiatan program pengembangan. Dengan definisi tersebut PRA harus dilihat sebagai sebuah pendekatan kajian partisipatif dalam melakukan analisa situasi, potensi maupun masalah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Penyelenggaraan kegiatan PSETK dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Partisipatif; semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PSETK mempunyai peran dan kepentingan yang sama, sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan.
- (2) Kemandirian; pelaksanaan kegiatan PSETK dilaksanakan dengan spirit membangun kemandirian melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal.
- (3) Akurasi dan validitas; data dan informasi yang dikumpulkan harus akurat dan valid sehingga membutuhkan ketelitian yang memadai dalam mencermati kondisi yang ditemukan di lapangan.

- (4) Kerjasama Tim; penyelenggaraan kegiatan PSETK diwujudkan dalam kerjasama antarpihak yang terkait dalam suatu tim (KPL<sup>5</sup>, HIPPA, dan TPM<sup>6</sup> (Tenaga Pendamping Masyarakat/ Fasilitator).
- (5) Belajar Bersama; kegiatan PSETK diselenggarakan sebagai proses pembelajaran bersama dengan mengutamakan kolektivitas berdasarkan pendekatan pembelajaran sosial.

Sedangkan tujuan penyusunan PSETK adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat serta aktual sebagai masukan dalam proses perencanaan program teknis, kelembagaan, usahatani, dan usaha ekonomi lainnya pada suatu daerah irigasi berdasarkan potensi sumberdaya lokal melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan profil sosial dan ekonomi, serta mengidentifikasi potensi sumber daya lokal;
- (2) Penyusunan profil teknis pengelolaan irigasi (operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi), termasuk gambaran ketersediaan air, kondisi fisik dan fungsi jaringan irigasi, serta lahan pertanian beririgasi;
- (3) Penyusunan profil kelembagaan dengan mengidentifikasi kelembagaan lokal yang ada, kebutuhan pembentukan organisasi HIPPA/GHIPPA dan upaya pengembangannya berdasarkan hasil penelusuran kebutuhan petani; dan
- (4) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi HIPPA baik pada aspek teknis, kelembagaan maupun usahatani dan usaha ekonomi produktif.

Kegiatan dalam penyusunan PSETK adalah sebagai berikut:

- (1) Persiapan; terdiri dari koordinasi dengan seluruh anggota HIPPA, tokoh masyarakat dan Pendamping.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitator; Ketua tim sekaligus penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penyusunan PSETK diketuai dari unsur Bappeda<sup>7</sup> yang menangani kegiatan irigasi, anggota tim terdiri dari unsur dinas terkait dengan irigasi, yaitu Dinas PU Pengairan, Dinas Pertanian, dan dinas lainnya yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan irigasi, anggota HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, TPM, KPL .
- (3) Analisa kebutuhan untuk kegiatan; alat tulis, kertas gambar, meteran (alat pengukur panjang, dokumen penunjang (Buku Daerah Irigasi, Peta Jaringan Irigasi, Buku Catatan Operasi dan Pemeliharaan, atau dokumen lainnya yang diperlukan).
- (4) Pelaksanaan; penelusuran jaringan irigasi dimulai dari saluran hulu sampai hilir, berbagai kerusakan dan kebutuhan berdasarkan hasil pengamatan/ observasi ditulis secara lengkap.
- (5) Pengisian form PSETK; mengisi form yang telah disediakan dengan lengkap.

<sup>5</sup> KPL (Kelompok Pendamping Lapangan) adalah kelompok pendamping HIPPA yang biasanya terdiri dari unsur kedinasan yang terkait, seperti: Penyuluh, Juru Pengairan, Aparatur Pemerintahan desa atau kecamatan.

<sup>6</sup> TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat) merupakan tenaga lapang dari masyarakat yang sengaja direkrut untuk mendampingi HIPPA dalam proses penelusuran jaringan dan penyusunan PSETK.

<sup>7</sup> Program WISMP sebagai program pemberdayaan ini melibatkan tiga kedinasan, Bappeda bertindak sebagai Koordinator.

- (6) Analisis hasil; memberikan penilaian dan rekomendasi terkait potensi dan kebutuhan HIPPA, baik tentang kelembagaan, teknik pengairan, teknik pertanian dan pembiayaan.

**2. Pemberdayaan HIPPA melalui PSETK**

Melalui penyusunan PSETK dapat ditentukan beberapa strategi pemberdayaan HIPPA, yaitu: strategi pemberdayaan kelembagaan, strategi pemberdayaan teknis jaringan irigasi dan strategi peningkatan kemampuan pembiayaan.

**1). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan**

Pemberdayaan kelembagaan dimaksudkan untuk peningkatan kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif. Pemberdayaan kelembagaan dilakukan dengan aspek-aspek sebagai berikut : Legalitas, Struktur dan Administrasi Kelembagaan HIPPA/GHIPPA, Aktivitas Pengurus serta Jumlah anggota yang terlibat.

- **Legalitas Kelembagaan HIPPA/GHIPPA**

GHIPPA Sumber Barokah - DI. Wringin mempunyai potensi kelembagaan sebab: sudah ada pembentukan, legalitas sampai Pengadilan Negeri serta revitalisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka GHIPPA Sumber Barokah - DI. Wringin sudah memiliki faktor-faktor pembatas dan pengikat dalam pengendalian perilaku sosial untuk bekerjasama antar anggota, serta mengadakan kerjasama dengan lembaga lain untuk mencapai tujuan bersama.

- **Struktur Organisasi Kelembagaan HIPPA/GHIPPA**

Struktur organisasi GHIPPA Sumber Barokah - DI. Wringin adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kepengurusan GHIPPA Sumber Barokah

No.	Nama	Jabatan
1.	Ambri	Ketua GHIPPA
2.	Sudri	Wakil Ketua GHIPPA
3.	Sarnoto	Bendahara GHIPPA
4.	Abdullah	Sekretaris GHIPPA
5.	Musto	Bagian Teknis

Sumber: PSETK DI. Wringin, 2014.

**Usulan Revitalisasi Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka struktur organisasi tersebut perlu dilakukan revitalisasi struktur organisasi sebagai berikut :

- (1) Luas wilayah kerja GHIPPA yang cukup luas perlu penambahan Bagian Teknis.
- (2) Perlu keterwakilan pengurus HIPPA desa di dalam GHIPPA.



- (3) Mendorong desa anggota GHIPPA untuk merevitalisasi HIPPA desanya supaya bisa aktif kembali sehingga kelembagaan GHIPPA bisa berjalan dengan normal.
- (4) Untuk peningkatan kemampuan, GHIPPA melakukan Usulan Pelatihan bagi Pengurus GHIPPA sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2. Usulan Pelatihan

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah
1.	Pelatihan Kelembagaan	4 orang
2.	Pelatihan Teknis	3 orang
3.	Pelatihan Keuangn	4 orang
Jumlah		11 orang

Sumber: PSETK DI. Wringin, 2014

### Administrasi Kelembagaan

Kemampuan administrasi kelembagaan merupakan kemampuan GHIPPA dalam melaksanakan prosedur administrasi kelembagaan, meliputi :

- (1) Daftar Anggota dan Pemilikan Lahan.  
Pada saat ini GHIPPA sudah mempunyai catatan daftar anggota dan pemilikan lahan. Catatan daftar anggota dan pemilikan lahan diperoleh dari pencatatan yang dilakukan oleh HIPPA. Pencatatan yang dilakukan kira-kira 30 %.
- (2) Peta dan Skema Wilayah Kerja.  
Peta Daerah Irigasi, Skema Jaringan Irigasi, Skema Bangunan Irigasi dan Skema Sosiohidro pada saat ini sudah dimiliki olehh GHIPPA Sumber Barokah.
- (3) Inventarisasi Jaringan Irigasi.  
Bangunan Bagi, Sadap dan Bagi Sadap, Saluran dan Bangunan Pelengkap saat ini sudah dimiliki oleh GHIPPA.
- (4) Dokumentasi/ Pembukuan.  
Buku Tamu, Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar, Buku Notulen Rapat, Penelusuran Jaringan dan Buku PSETK sudah dimiliki oleh GHIPPA.

Strategi yang diterapkan dalam peningkatan kemampuan administrasi kelembagaan meliputi : penyediaan buku pemberdayaan, pendampingan pelaksanaan buku pemberdayaa.

- (1) Pendampingan Pelaksanaan Buku Pemberdayaa
  - a. Pendampingan pengisian Buku Keuangan dan Manajemen IPAIR.
  - b. Pendampingan pengisian Program Kerja HIPPA/ GHIPPA dan PSETK.
- (2) Pembuatan dan *Up-dating* Peta dan Skema Wilayah Kerja.  
Pembuatan dan *Up-dating* Peta dan Skema Wilayah Kerja telah dilaksanakan pada tahun 2013, selanjutnya dilakukan *up-dating* saja.
- (3) Pendampingan Pengisian Pembukuan

- **Aktivitas Pengurus dan Rapat Anggota**

Aktivitas pengurus dan Rapat Anggota pada saat ini adalah sebagai berikut :

- (1) Aktivitas pengurus kurang aktif dalam satu tahun terakhir.
- (2) Rapat anggota belum dilaksanakan.

Strategi pemberdayaan HIPPA/GHIPPA untuk peningkatan aktivitas pengurus GHIPPA dan Rapat Anggota adalah sebagai berikut :

- (1) Mengaktifkan kembali pertemuan bulanan dengan melibatkan pengurus HIPPA desa, tidak hanya Sub Blok saja.
- (2) Memberi pengertian tentang pentingnya aktivitas pengurus GHIPPA.
- (3) Menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi terhadap GHIPPA.
- (4) Menyusun rencana kegiatan pengurus setiap bulan.
- (5) Bekerjasama dengan Kepala Desa untuk melakukan Rapat Anggota.

- **Jumlah Anggota yang Terlibat**

Wilayah kerja GHIPPA Sumber Barokah - DI. Wringin meliputi 2 desa. Dari jumlah tersebut, HIPPA yang sudah terbentuk 6 HIPPA dengan kondisi jumlah anggota yang terlibat pada saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar HIPPA yang terbentuk

No.	Lokasi Jaringan Irigasi	Jumlah HIPPA	Persentase Petani
1.	Hulu	1 HIPPA	40%
2.	Tengah	1 HIPPA	40%
3.	Hilir	1 HIPPA	20%

Sumber: PSETK DI. Wringin, 2014.

**2). Strategi Pemberdayaan Teknis Jaringan Irigasi**

Strategi pemberdayaan teknis jaringan irigasi dilakukan untuk: (i) peningkatan jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, (ii) jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan (iii) meningkatnya usaha tani. Selain itu, sebagai dasar dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dilaksanakan pemahaman jaringan irigasi.

Pada saat ini, pelaksanaan teknis GHIPPA Sumber Barokah - DI. Wringin belum baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara HIPPA desa dengan pengurus GHIPPA sehingga tidak meratanya pembagian air.

Strategi pemberdayaan teknis jaringan irigasi yang telah dilakukan adalah :

- (1) Peningkatan pemahaman teknis irigasi dilakukan dengan:
  - a. Pemantapan wilayah kerja dengan inventarisasi petak tersier.
  - b. Pemantapan bangunan dan saluran dengan pembuatan/ *up-dating*: Skema Jaringan Irigasi, Skema Bangunan Irigasi dan Skema Sosiohidro
- (2) Inventarisasi potensi dan keberfungsian bangunan dan saluran irigasi.
- (3) Berdasarkan potensi butir (1) dan (2), dilakukan analisis jumlah tenaga *ulu-ulu* (pembagi air).

Sedangkan rencana strategi pemberdayaan teknis jaringan irigasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kemampuan *ulu-ulu*: pemahaman Rencana Tata Tanam, Rencana Penyediaan Air Tahunan, Rencana Pembagian Air Irigasi.
- (2) Kemampuan dalam partisipasi pemeliharaan jaringan irigasi: penelusuran jaringan irigasi, rencana pemeliharaan.
- (3) Peningkatan kemampuan usaha tani: penyuluhan teknis budidaya, pembuatan pupuk organik dan penerapan pertanian organik.

### 3). Strategi Peningkatan Kemampuan Pembiayaan

Strategi peningkatan kemampuan pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya. Strategi ini dibedakan menjadi dua, yaitu: kemampuan pengelolaan keuangan dan kemampuan pembiayaan pengelolaan.

#### (1) Kemampuan Pengelolaan Keuangan

Pada saat ini, pengelolaan keuangan GHIPPA Sumber Barokah - DI. Wringin belum baik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan SDM pengurus GHIPPA sehingga pengadministrasian keuangan belum bisa dilaksanakan.

Strategi yang telah dilaksanakan dalam peningkatan pengelolaan keuangan adalah : pelatihan manajemen keuangan dan pendampingan manajemen keuangan. Sedangkan rencana strategis keuangan yang akan dilaksanakan adalah pendampingan pengisian buku keuangan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan dan tertib manajemen keuangan.

#### (2) Manajemen IPAIR

IPAIR (Iuran Pengelolaan Irigasi) merupakan iuran yang dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan oleh HIPPA, Gabungan HIPPA dan Induk HIPPA secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi. IPAIR ini merupakan salah satu sumber dana yang dipergunakan untuk pendayagunaan air irigasi dan memelihara jaringan irigasi serta usaha-usaha pengembangan kelembagaan Gabungan HIPPA. IPAIR bertujuan menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota HIPPA berupa uang dan atau tenaga untuk.

- a. Pendayagunaan air irigasi.
- b. Memelihara jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya.
- c. Usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.

Pada saat ini, manajemen IPAIR GHIPPA Sumber Barokah - DI. Wringin belum baik. Hal ini disebabkan oleh sedikit masuknya IPAIR ke kas GHIPPA. Rencana strategi manajemen IPAIR dengan melaksanakan aktivitas kelembagaan sebagai berikut:

- a. Persiapan IPAIR, dilakukan dengan: pendataan anggota dan persiapan administrasi.
- b. Pengedaran tagihan IPAIR
- c. Penarikan tagihan IPAIR

## KESIMPULAN

PSETK adalah gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) untuk perencanaan program peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif. Penyelenggaraan kegiatan PSETK dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: partisipatif, kemandirian, akurasi dan validitas, kerjasama tim dan belajar bersama. Sedangkan tahap dalam penyusunan PSETK adalah: persiapan, pembentukan tim fasilitator, analisa kebutuhan untuk kegiatan, pelaksanaan penelusuran jaringan, pengisian form PSETK dan menganalisis hasil.

Setelah penyusunan PSETK dapat ditentukan beberapa strategi pemberdayaan HIPPA yaitu:

1. Strategi pemberdayaan kelembagaan; terdiri dari: legalitas kelembagaan HIPPA, struktur organisasi kelembagaan HIPPA, administrasi kelembagaan, aktifitas pengurus dan rapat anggota serta jumlah anggota yang terlibat.
2. Strategi pemberdayaan teknis jaringan irigasi; terdiri dari: peningkatan pemahaman teknis irigasi, inventarisasi potensi dan keberfungsian bangunan dan saluran irigasi
3. Strategi peningkatan kemampuan pembiayaan; terdiri dari: kemampuan pengelolaan keuangan dan kemampuan pembiayaan pengelolaan.

## RERERENSI

- Ambler, John S. 1992. Irigasi Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani. LP3ES. Jakarta.
- Anonimous. 2014. Buku Panduan Profil Sosial Ekonomi dan Teknik Kelembagaan (PSETK). Jakarta.
- Chamber, 1996. PRA-Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius, Oxfam dan Yayasan Mitra Tani.
- MS Iskandar, 2013. Laporan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan. Daerah Irigasi Wringin. Bappeda Kab. Probolinggo. 2013.
- Nuchsin, Prasetyo. 2014. Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelembagaan. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomer. 30/ PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi